

Bab 4

Analisis Isu-Isu Strategis

4.1. Permasalahan Pembangunan

Masyarakat yang semakin cerdas kini banyak mempersoalkan kebijakan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat, akademisi, dunia usaha dan pemerintah sesungguhnya merupakan pelaku utama pembangunan. Selanjutnya untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, tentu banyak terdapat permasalahan-permasalahan pembangunan yang akan dihadapi yang bersifat strategis. Permasalahan-permasalahan ini akan mempengaruhi pembangunan Kota Tangerang Selatan sehingga perlu diantisipasi secara terencana dan sistematis. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau antara apa yang diharapkan dengan kondisi riil. Berikut disajikan permasalahan-permasalahan pembangunan Kota Tangerang Selatan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

1. Pendidikan:

- Aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih perlu ditingkatkan.

- Masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan.
- Kualitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih perlu ditingkatkan.
- Tingkat ketersediaan *database* kependidikan masih kurang.
- Capaian Angka Melek huruf belum optimal.
- Pendidikan non formal masih perlu digalakkan cakupannya.
- Penerapan sistem kuota dalam pendaftaran sekolah perlu dioptimalkan.

2. Kesehatan:

- Masih relatif tingginya angka kesakitan
- Aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu masih kurang.
- PHBS masyarakat masih kurang.
- Peran serta segenap *stakeholder* terhadap peningkatan kesehatan belum optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- Ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana wilayah masih kurang.
- Ketaatan pada pemanfaatan ruang yang masih kurang, tata kota semrawut, kemacetan, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik.
- Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur air minum, air limbah, drainase dan persampahan belum optimal.
- Penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
- Prasarana pengendali banjir masih perlu ditingkatkan.
- Kemantapan dan kondisi jalan perlu dijaga dan ditingkatkan lagi.
- Peningkatan kapasitas ruas jalan dan kapasitas simpang belum optimal.
- Kepastian hukum akan penggunaan ruang belum optimal.
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota dan kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang yang berlaku masih kurang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- Perumahan di kawasan permukiman kumuh perlu ditingkatkan kualitasnya.

- Penataan dan penyediaan hunian vertikal serta permukiman yang layak dengan akses sanitasi yang memadai perlu lebih ditingkatkan.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
- Penciptaan rasa aman dan nyaman di masyarakat belum optimal.
 - Pemeliharaan kerukunan perlu selalu ditingkatkan lagi.
 - Jumlah kelompok siskamling aktif perlu dipertahankan.
 - Jumlah kelurahan sadar hukum masih kurang.
 - Penegakan Perda dan Peraturan Walikota masih kurang.
6. Sosial:
- Kemiskinan dan kepadatan penduduk masih menjadi persoalan besar dan membutuhkan perhatian tersendiri.
 - Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih kurang.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

1. Tenaga Kerja:
- Pengangguran terbuka masih relatif tinggi.
 - Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang sesuai dengan sektor yang membutuhkannya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung daya saing daerah.
 - Kuantitas dan kualitas lembaga pelatihan kerja masih kurang.
 - Pengelolaan *Database* tenaga kerja masih kurang.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak:
- Partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah masih kurang.
 - Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender masih kurang.
 - Upaya untuk menekan pengaruh negatif globalisasi terhadap anak dan remaja belum optimal.
 - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka kesetaraan gender perlu ditingkatkan.
3. Pangan:
- Ancaman kedaulatan dan ketahanan pangan.

- Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi masih kurang.
- Pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat perlu lebih dioptimalkan.

4. Pertanian:

- Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai sehingga sumberdaya tersebut tidak dapat dipetik manfaatnya bagi kehidupan bersama.
- Perencanaan penggunaan tanah perlu dioptimalkan sesuai peruntukan berdasarkan rencana tata ruang.
- Belum optimalnya akselerasi pembebasan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.

5. Lingkungan Hidup:

- Pencemaran lingkungan yang semakin memperburuk kondisi kualitas lingkungan.
- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang.
- Penyediaan ruang terbuka hijau masih kurang.
- Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri masih kurang.
- Pengembangan IPAL komunal dan prasarana air limbah individual pada kawasan permukiman belum optimal.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- Pertumbuhan penduduk (3-4%) dan Kepadatan Penduduk (9.806 jiwa/km²) dengan komposisi jumlah pria lebih banyak menjadi tantangan tersendiri terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga perpindahan penduduk banyak yang tidak terdeteksi.
- Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta Catatan Sipil) belum maksimal.
- Data Base Kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan keakuratan dan validitasnya.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- Pengembangan masyarakat kelurahan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih kesempatan peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan sarana modal sosial dimasyarakat belum optimal.
- Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan, RW dan RT masih kurang.
- Inovasi dan pemanfaatan TTG masih kurang.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:

- Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dengan persebaran yang tidak terpantau.
- Migrasi netto cenderung meningkat.
- Jumlah peserta KB baru masih belum optimal.
- Bina Keluarga Balita Mandiri, cakupan PUS peserta KB serta anggota Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja ber-KB perlu ditingkatkan.
- Masih terdapatnya perkawinan usia muda.

9. Perhubungan:

- Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan.
- Pengembangan sarana angkutan umum massal yang efektif, efisien dan terintegrasi masih kurang.
- Tingginya tingkat kemacetan di beberapa titik jalan.

10. Komunikasi dan Informatika:

- Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.
- Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kurang optimal.
- Pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pelaksanaan *e-Government* untuk meningkatkan pelayanan publik mendukung Tangerang Selatan Cyber City belum optimal.
- Pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebagai bagian keterbukaan informasi perlu ditingkatkan.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah:

- Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna, akses pembiayaan, informasi dan lembaga.
- Daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor.
- Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.
- Daya saing UMKM masih kurang.

12. Penanaman Modal:

- Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata.
- Kepastian hukum bagi investor perlu ditingkatkan.

13. Kepemudaan dan Olah Raga:

- Terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.
- Semangat kewirausahaan dan pendidikan karakter pemuda perlu ditingkatkan.
- Peran serta pemuda dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba belum optimal.
- Standar mutu organisasi kepemudaan perlu ditingkatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terbatasnya ketersediaan sarana olahraga baik berskala nasional maupun internasional.
- Pembinaan olahraga prestasi masih kurang.
- Peran serta masyarakat dalam olah raga rekreasi perlu ditingkatkan.

14. Statistik:

- Ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, *up to date* dan komprehensif masih kurang.
- Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik.
- Referensi data pembangunan yang berbeda-beda.

15. Persandian:

- Kurangnya perhatian pengguna tentang pentingnya pengamanan pengiriman berita rahasia. Bahkan pengiriman berita rahasia sering hanya menggunakan mesin faximile biasa sehingga kerahasiaan tidak ada.

16. Kebudayaan:

- Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya.
- Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda.
- SDM pelaku kesenian belum optimal.
- Tempat kesenian yang memadai untuk melakukan gelar seni pertunjukan perlu ditingkatkan.
- Sarana pemasaran produk seni budaya daerah masih kurang.
- Pengelolaan keragaman budaya dan seni yang berciri khas Kota Tangerang Selatan belum optimal.

17. Perpustakaan:

- Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan;
- Minat baca masyarakat masih rendah.
- Peningkatan SDM pengelola perpustakaan belum optimal.

18. Kearsipan.

- Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan.
- Ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang handal dan profesional perlu ditingkatkan.
- Kualitas pelayanan informasi kearsipan masih kurang.
- Budaya tertib arsip di jajaran aparatur pemerintah daerah dan masyarakat masih kurang.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan:

1. Kelautan dan Perikanan:

- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perikanan budidaya perlu ditingkatkan.
- Produksi budidaya perikanan belum optimal.

2. Pariwisata:

- Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing.
- Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial.
- Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan.

- Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan.
- Kualitas daya tarik obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih kurang.
- Minimnya anggaran untuk meningkatkan obyek dan daya tarik wisata Kota Tangerang Selatan.

3. Pertanian:

- Tingginya konversi lahan pertanian.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral:

- Belum optimalnya cakupan pelayanan elektrifikasi rumah.
- Terbatasnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan serta belum optimalnya konservasi energi.

5. Perdagangan:

- Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi.
- Perkembangan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan belum optimal.
- Jumlah sarana perdagangan masih perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- Ekspor bersih perdagangan masih perlu ditingkatkan.
- Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor.

6. Perindustrian:

- Perkembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan masih kurang.
- Pengembangan kawasan industri dalam rangka meningkatkan daya saing industri perlu ditingkatkan.
- Daya saing produk IKM dan kemitraan IKM dengan industri besar masih perlu ditingkatkan.
- Pemanfaatan bahan baku lokal masih rendah.
- Inovasi produk masih rendah.
- Penguasaan teknologi rendah.
- Kurangnya produktivitas bahan baku substitusi impor.

4.2. Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Sebuah kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4.2.1. Isu Strategis Internasional

Dinamika yang terjadi di Indonesia, Provinsi Banten, dan bahkan di Kota Tangerang Selatan sendiri tidak akan terlepas dari faktor pengaruh dinamika yang terjadi di dunia internasional. Isu internasional yang terjadi di dunia pada saat ini lebih banyak ditandai dengan krisis keuangan global, harga minyak mentah, dan perubahan iklim ekstrim. Kondisi tersebut diyakini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan Ketersediaan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM, Kesejahteraan Sosial, dan Lingkungan Hidup. Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals (MDGs)* sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Sosial Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca

MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Sosial Sustainability.

Ada 5 pondasi dari *SDGs* yaitu (manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan).

1. Tujuan pertama yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Tujuan kedua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan ketiga yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Tujuan keempat yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Tujuan kelima yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Tujuan keenam yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Tujuan ketujuh yakni menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Tujuan kedelapan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Tujuan kesembilan yakni membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Tujuan kesepuluh yakni mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Tujuan kesebelas yakni menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Tujuan duabelas yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Tujuan ketigabelas yakni mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Tujuan keempatbelas yaitu melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Tujuan kelimabelas yaitu melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Tujuan keenambelas yaitu mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Tujuan ketujuhbelas yaitu memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Gambar 4.1.
Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Selanjutnya pada tataran di daerah perlu dipikirkan mengenai bagaimana mendukung pencapaian tujuhbelas tujuan SDGs. Pembangunan daerah berwawasan lingkungan mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara simultan dengan kelestarian lingkungan. Transisi menuju paradigma pertumbuhan ekonomi hijau ini perlu memperhatikan beberapa hal sebagai prasyarat keberhasilan, seperti insentif dan disinsentif aktivitas ekonomi hijau, review kebijakan yang tidak pro lingkungan, dan kapasitas pengembangan teknologi melalui penelitian dan pengembangan (litbang).

Berbagai insentif yang telah disediakan pemerintah terutama di bidang EBT dirasa kurang memadai karena terkendala pada harga BBM dan energi listrik yang begitu murah.

Selisih harga yang masih terlalu tinggi kurang menarik minat investasi swasta. Untuk itu, perlu pikirkan kembali kebijakan insentif dan disinsentif di daerah apa saja yang diperlukan agar dapat memacu diversifikasi energi non fosil terutama memperkecil selisih harga antara energi baru terbarukan dan energi fosil. Ketiadaan green tax sebagai upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi juga menjadi kendala. Oleh karena itu, penetapan pajak lingkungan sesungguhnya perlu dipertimbangkan untuk mencapai target ekonomi hijau. Misalnya industri di Tangerang Selatan dengan tingkat polusi tinggi perlu dikenakan pungutan wajib (*the polluter pays principle*) supaya kedepannya sektor industri lebih peduli terhadap kualitas lingkungan. Disamping itu, harus diakui bahwa masih banyak regulasi kita yang disusun tanpa analisis yang mendalam serta proses konsultasi publik yang sangat terbatas sehingga efektivitas peraturan tersebut menjadi kurang optimal baik dilihat dari sisi manfaat, biaya dan efek dari peraturan yang diterbitkan. Hal lain yang turut menghambat migrasi ke ekonomi hijau adalah penguasaan teknologi di bidang energi terbarukan juga masih rendah. Kedepan, mengingat bahwa ekonomi hijau memerlukan biaya tinggi (*being green is costly*) maka peran pemerintah dalam menciptakan prakondisi yang bersahabat bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi hijau sangat diperlukan. Dalam kondisi sekarang ini, keengganan para pengusaha menanamkan investasi mereka pada industri hijau karena biaya yang tinggi tanpa kejelasan keuntungan pasti dalam jangka pendek cukup bisa dipahami. Oleh karena itu peran pemerintah sangat penting dalam memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka mendukung upaya mitigasi emisi sekaligus ramah investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Dalam skala nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan. Dalam konteks pengembangan kewilayahan, Provinsi Banten dan Kota

Tangerang Selatan merupakan bagian dari Wilayah Jawa-Bali, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di Wilayah Jawa-Bali yang meliputi:

- 1) Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional.
- 2) Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian.
- 3) Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
- 4) Menurunnya daya dukung lingkungan.
- 5) Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital.
- 6) Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali.
- 7) Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali.
- 8) Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- 9) Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya
- 10) Tingginya kasus tindak pidana korupsi.
- 11) Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta.
- 12) Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
- 13) Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi

Berdasarkan isu-isu internasional dan nasional di atas, selanjutnya dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi pada 5 (lima) tahun mendatang, isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 meliputi infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Secara kewilayahan dari sudut pandang Provinsi Banten, maka isu-isu strategis Kota Tangerang Selatan adalah:

- 1) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD Serpong-Parung
- 2) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-Simpang Gaplek-Sawangan
- 3) Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan
- 4) Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan
- 5) Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan
- 6) Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara Soekarno-Hatta
- 7) Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Setu
- 8) Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 9) Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron
- 10) Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur bangunannya kearah vertikal
- 11) Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional.

4.2.4. Isu Strategis Daerah

Kota Tangerang Selatan mendapat penghargaan dari *The Eastern Regional Organization for Planning and Housing* (EAROPH) yang merupakan organisasi non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). EAROPH memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah kabupaten/kota atas terobosan mereka dalam pembangunan. Penghargaan yang diterima Kota Tangerang Selatan berkaitan dengan *Public & Private Partnership for Public Space Division*. Kota Tangerang Selatan mendapat penghargaan karena berhasil membangun kerjasama pemerintah dan swasta. Kota Tangerang Selatan tidak memiliki banyak anggaran namun berhasil menggandeng para pengembang-pengembang untuk membangun bersama-sama menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota yang nyaman/layak huni (*liveable city*).



Gambar 4.2.
Sustainable Liveable City

Saat ini banyak warga kota yang mengeluhkan ketidaknyamanan lingkungan tempat tinggal mereka, mulai dari masalah kemacetan, tidak terawatnya fasilitas umum hingga masalah kebersihan lingkungan. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang mendambakan sebuah kota yang nyaman dan memang layak untuk dihuni. Mereka menginginkan *Livable city*. Dapat dikatakan bahwa *Livable City* merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Dalam kaitannya dengan *Livable City* setidaknya terdapat tujuh variabel utama perkotaan, yaitu: Fisik Kota, Kualitas Lingkungan, Transportasi – Aksesibilitas, Fasilitas, Utilitas, Ekonomi dan Sosial.

Berpedoman pada tujuh variabel tersebut, maka terdapat 25 kriteria penentuan *liveable city* seperti berikut ini:

- 1) Kualitas Penataan Kota
- 2) Jumlah Ruang Terbuka

- 3) Perlindungan Bangunan Bersejarah
- 4) Kualitas Kebersihan Lingkungan
- 5) Tingkat Pencemaran Lingkungan
- 6) Ketersediaan Angkutan Umum
- 7) Kualitas Angkutan Umum
- 8) Kualitas Kondisi Jalan
- 9) Kualitas Fasilitas Pejalan Kaki
- 10) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
- 11) Kualitas Fasilitas Kesehatan
- 12) Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
- 13) Kualitas Fasilitas Pendidikan
- 14) Ketersediaan Fasilitas Rekreasi
- 15) Kualitas Fasilitas Rekreasi
- 16) Ketersediaan Energi Listrik
- 17) Ketersediaan Air Bersih
- 18) Kualitas Air Bersih
- 19) Kualitas Jaringan Telekomunikasi
- 20) Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
- 21) Tingkat Aksesibilitas Tempat Kerja
- 22) Tingkat Kriminalitas
- 23) Interaksi Hubungan Antar Penduduk
- 24) Informasi Pelayanan Publik
- 25) Ketersediaan Fasilitas Kaum Difable

Selanjutnya cita-cita Kota Tangerang Selatan menjadi kota yang berwawasan ramah lingkungan atau sering disebut sebagai *Green City* perlu segera diwujudkan. Taman-taman kota tidak hanya di tanah lapang dan ruang terbuka hijau (RTH), tetapi juga jalur pemisah dan di persimpangan jalan raya. **Green city** memang bukan hanya kota yang hijau berkat taman-taman kota yang indah di RTH, tetapi juga didukung oleh *planning and design* atau perencanaan dan rekayasa.

Untuk mewujudkan *green city*, tidak hanya menata bangunan, tetapi juga menyediakan *green infrastructure*. Kota Tangerang Selatan harus berkonsep kota hijau.

Dengan begitu, tidak saja mengatur atau menata bangunan menuju *green building*, tetapi harus didukung dengan akses jalan, hal ini terkait dengan efisiensi penggunaan lahannya. Sudah saatnya bangunan-bangunan di Kota Tangerang Selatan berciri *green building*. Salah satu parameternya adalah gedung tersebut hemat energi. Di samping itu, kita melihat perkampungan yang tumbuh di dalam kota, mampu mempertahankan Tangsel sebagai kota yang bersih dan hijau. Berdasarkan data dari *Leadership in Enviromental Design (LEED)*, bangunan gedung menyumbang sampai 50 persen karbon.



Gambar 4.3.
Ilustrasi Green City

Ada enam kriteria yang diukur dalam green building yaitu pengolahan lahan sekitar, penggunaan air, penggunaan energi, material dan dari mana sumber material itu, kualitas di dalam ruangan, dan inovasi. Untuk menunjang menjadi *Green City*, perlu menjalankan konsep *Green Planning and Design*, *Green Open Space*, *Green Building*, *Green Transport*, *Green Community*, *Green Waste*, *Green Water*, dan *Green Energy*. Setelah melakukan kampanye green building, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu melakukan evaluasi greenship pada bangunan-bangunan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Setelah diadakan evaluasi, berlanjut penerapan green building, persiapan pembuatan Perda (Peraturan Daerah), pelaksanaan Perda. Apabila landasan hukumnya sudah ada dan kuat sebagai pijakan, maka masyarakat benar-benar dapat menerapkan hidup dengan ramah lingkungan dan rendah emisi.

Smart city berarti kota cerdas. Saat kita mengatakan suatu kota adalah kota yang cerdas, sebenarnya adalah sebuah majas personifikasi yang mengumpakan kota seperti manusia seakan kota dapat merasakan, berpikir dan bertindak terhadap kondisi internal dan eksternal dari kota tersebut. *Smart City*/kota cerdas didefinisikan sebagai sebuah konsep kota yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga di dalamnya untuk melakukan kegiatan atau mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Konsep Kota Cerdas adalah suatu konsep yang tidak akan pernah berhenti berkembang. Kota cerdas didasari atas perkembangan teknologi dan pola pikir dari manusia. Perkembangan teknologi yang tidak akan pernah berhenti, sehingga konsep kota cerdas pun tidak akan pernah berhenti berkembang. Sama halnya dengan pola pikir manusia yang terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kota dengan seluruh bagian di dalamnya saling berinteraksi dan dikelola oleh manusia dengan membentuk pemerintahan, bisnis, komunitas dan organisasi lainnya. Kota cerdas menjadi usaha dari manusia untuk membuat kota menjadi lebih nyaman dan aman untuk ditinggali dengan melihat permasalahan di kota saat ini yang dialami masyarakat dan organisasi-organisasi, kemudian memecahkannya dengan memanfaatkan teknologi yang ada maupun mengembangkan teknologi baru.

Sama halnya dengan menilai kecerdasan manusia, berbagai metode dibuat untuk mengukur kecerdasan suatu kota. Untuk memudahkan penerapan dan pengukuran kecerdasan kota, konsep kota cerdas dibagi atas komponen-komponen yang saat ini didefinisikan berbeda-beda antar peneliti maupun pengembang smart city. Walaupun begitu, seiring berjalannya waktu, konsep dari kota cerdas menjadi semakin jelas hingga saatnya nanti perlu ditetapkan standar global dari konsep kota cerdas.

Seoul mendefinisikan kota cerdas dengan mengimplementasikannya dalam tiga komponen:

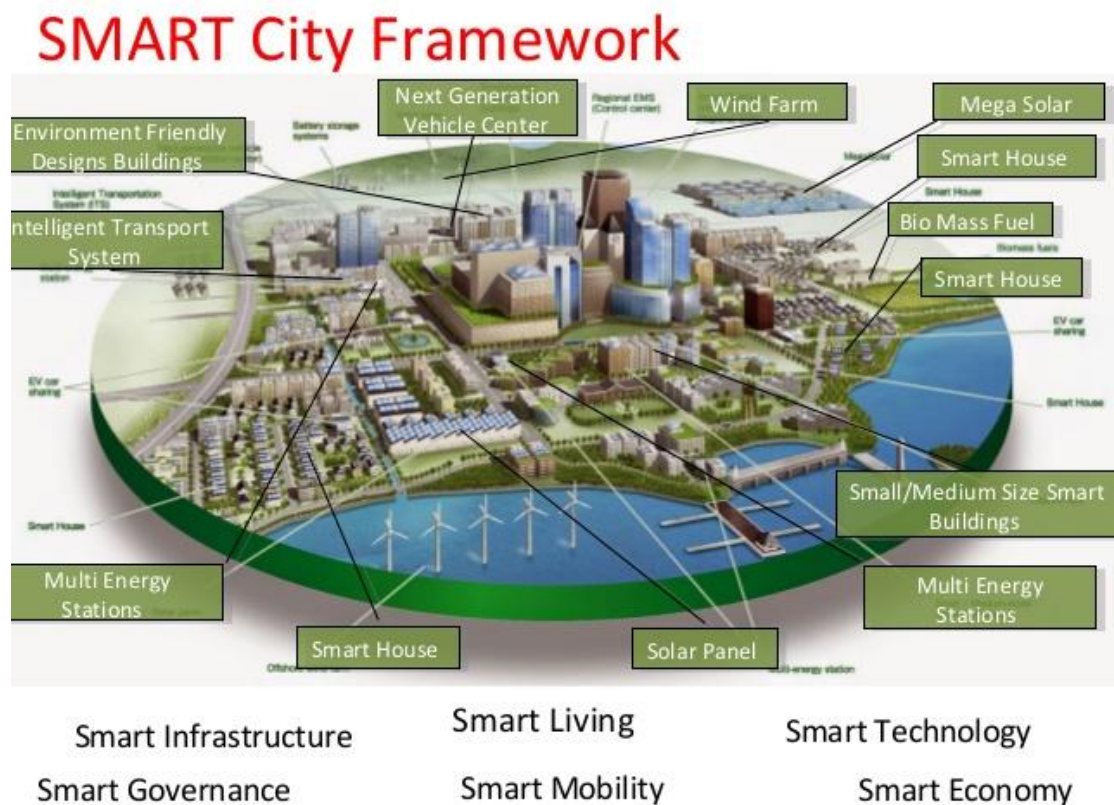
- 1) ICT Infrastructure: maksimalisasi infrastruktur teknologi terbaru dari TIK dalam meraih keberhasilan layanan smart city.
- 2) Integrated City-management Framework: Sebuah kerangka kerja pengelolaan kota. Semua proses yang terjadi secara harmoni dengan kepatuhan terhadap standar dan aturan.
- 3) Smart Users: Pengguna yang cerdas yang berinteraksi dengan layanan cerdas.

Sementara Amsterdam mendefinisikan kota cerdas dalam 5 komponen :

- 1) Smart Living: minimalisasi penggunaan energi dan pengeluaran kadar emisi seperti CO₂.
- 2) Smart Working: peningkatan pengadaan lapangan kerja, penggunaan teknologi dan peningkatan keamanan dalam bekerja.
- 3) Smart Mobility: pengembangan mobilitas dan sarana transportasi (bus, kereta,dll) dengan kadar emisi rendah, pembangunan infrastruktur yang cerdas.
- 4) Public facilities: pengembangan fasilitas publik yang nyaman dan mudah di akses seperti rumah sakit, taman, perpustakaan, dan sebagainya.
- 5) Open data: sumber data yang mudah didapat dan dikelola.

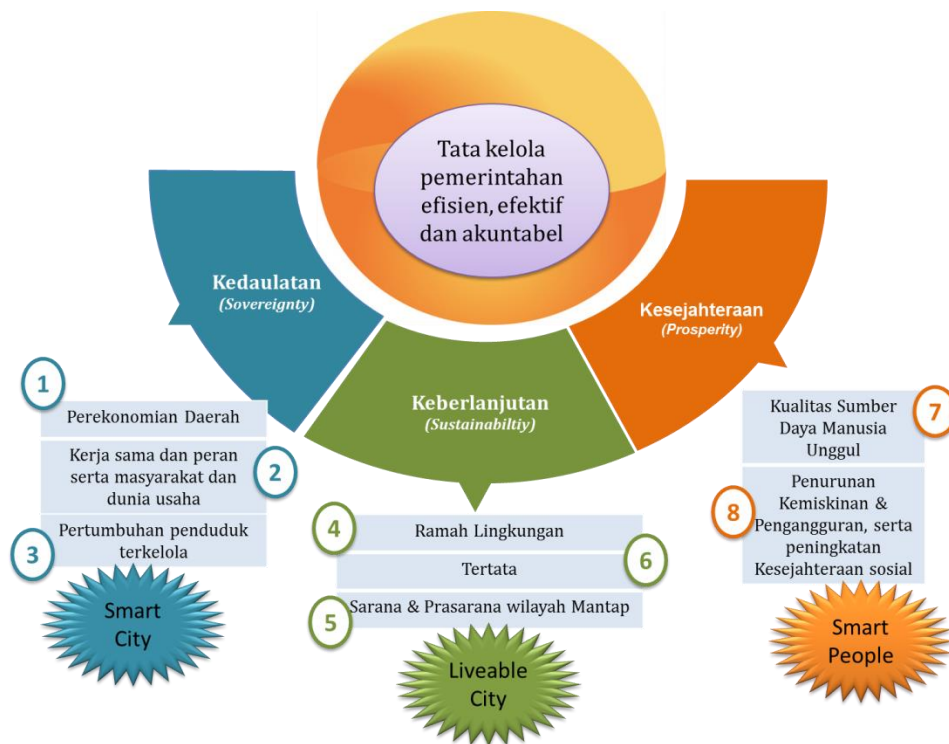
Sedangkan di Indonesia Smart City and Society Innovation Centre dari Insitut Teknologi Bandung mendefinisikan kota cerdas atas 6 komponen yaitu :

- 1) Infrastruktur fisik (*hard infrastructure*): lahan dan bangunan, transportasi dan jaringan utilitas serta TIK.
- 2) Sistem kota, dibagi atas aktivitas yang dilakukan untuk mengelola kota: pemerintahan, pendidikan,transportasi, kesehatan, energi, keamanan, lingkungan, sosial, keuangan dan perniagaan.
- 3) *Soft infrastructure* yaitu manusia dan institusi yang mengelola infrastruktur fisik, regulasi serta kehidupan sosial di perkotaan: kepemimpinan, tata kelola, forum inovasi.
- 4) Ekosistem: ekosistem publik, ekosistem usaha swasta, ekosistem komunitas serta ekosistem pihak ke-4.
- 5) Stakeholder: orang atau organisasi yang mempunyai kepedulian, dipengaruhi oleh, memiliki kepentingan, atau terlibat dalam beberapa permasalahan di perkotaan.
- 6) Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan kota cerdas.



Gambar 4.4.
Smart City Framework

Sedangkan pada aspek pengelolaan pemerintahan secara umum masih ditemukan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya diindikasikan melalui masih terdapat produk-produk hukum (perda) yang belum diselesaikan tepat waktu, pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, Opini BPK RI atas laporan keuangan 2 tahun tiga tahun terakhir masih WDP. Nilai AKIP Kota Tangsel juga masih CC.



Gambar 4.5.
Smart City Framework

Guna mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi cerdas (*Smart City*) dan kota yang layak huni (*Liveable City*) tentunya perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan lebih profesional, modern, maju dan akuntabel, sehingga memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Tata kelola yang baik, dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai *Good Governance* adalah serangkaian proses yang berlaku untuk kedua organisasi sektor publik dan swasta untuk menentukan keputusan.

PBB menekankan reformasi melalui pembangunan manusia dan reformasi lembaga politik. Menurut PBB, pemerintahan yang baik memiliki delapan karakteristik. Tata kelola yang baik adalah:

- Konsensus Berorientasi;
- Partisipatif;
- Mengikuti Aturan Hukum;
- Efektif dan Efisien;
- Akuntabel;
- Jelas;
- Responsif;

- Adil dan Inklusif

Segala upaya harus dilaksanakan oleh seluruh aparaturnya Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha sebagai pilar penyelenggaraan/tata kelola pemerintahan yang baik “*good governance*” dalam membangun Kota Tangerang Selatan “sebagai rumah dan kota kita” selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016-2021 sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Dengan melihat hasil identifikasi variabel penyebab yang mempengaruhi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang muncul di berbagai bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dandengan mengacu pada hasil evaluasi RPJMD periode lalu yang diperkirakan berdampak signifikan bagi daerah dan masyarakat Kota Tangerang Selatan di masa lima tahun mendatang, maka selanjutnya dapat diidentifikasi isu-isu strategis. Identifikasi Isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Isu Strategis Kota Tangerang Selatan 2016-2021

No	Isu Strategis
1	Kualitas Sumber Daya Manusia Meskipun IPM (79,17) relatif lebih baik dibanding kab/kota lain di Provinsi Banten, namun Angka Melek Huruf (AMH) dan Indeks Kemampuan Daya Beli Masyarakat/Purchasing Power Parity (PPP) Kota Tangsel masih perlu ditingkatkan apalagi jika dibanding nasional, agar daya saing daerah meningkat.
2	Pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk (3,5%) dan Kepadatan Penduduk (10.143 jiwa/km ²) dengan komposisi jumlah pria lebih banyak menjadi tantangan tersendiri terhadap masalah sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
3	Sarana dan Prasarana wilayah Aksesibilitas orang, barang dan jasa masih membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana wilayah apalagi sektor perdagangan, hotel dan restoran adalah penyumbang terbesar PDRB Kota Tangsel (31%). Disamping itu ketaatan pada pemanfaatan ruang yang masih kurang, tata kota semrawut, kemacetan, serta minimnya ruang terbuka hijau (RTH) untuk publik.
4	Perekonomian Daerah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TANGERANG SELATAN 2016-2021

	Meskipun perekonomian Kota Tangsel mampu tumbuh diatas 8,99%, namun inflasinya juga cukup tinggi (didas 10%). Daya beli masyarakat makin rendah, ketimpangan pendapatan semakin lebar karena produk dari pertumbuhan ekonomi yang ada kurang dirasakan masyarakat.
5	Kemiskinan dan kesejahteraan sosial Tingkat kemiskinan 1,62% dan tingkat pengangguran terbuka 6,92% sebagai dampak urbanisasi merupakan permasalahan kota yang harus diantisipasi agar tidak semakin meningkat.
6	Tata kelola pemerintahan Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya terdapat produk-produk hukum (perda) yang blm diselesaikan tepat waktu, pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, Opini BPK RI atas laporan keuangan 3 tahun berturut-turut masih WDP. Nilai AKIP Kota Tangsel masih CC.

Selanjutnya, keterkaitan isu strategis yang dimuat dalam RPJPD Kota Tangerang Selatan 2005-2025 dengan RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025
dengan RPJMD Tahun 2016-2021

RPJPD	RPJMD
Mengurangi tingginya pertumbuhan penduduk	Pertumbuhan penduduk
Pengurangan kesenjangan kesejahteraan	Kemiskinan dan kesejahteraan sosial Kualitas Sumber Daya Manusia
Pengaturan penataan ruang	Sarana dan Prasarana wilayah
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana Perkotaan	Sarana dan Prasarana wilayah
Kebutuhan Moda Transportasi yang Handal	Sarana dan Prasarana wilayah
Mengurangi Pencemaran Lingkungan	Sarana dan Prasarana wilayah
Pelibatan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan	Perekonomian Daerah
Peningkatan Pelayanan Birokrasi	Tata kelola pemerintahan
Penyediaan Hunian sehat	Sarana dan Prasarana wilayah
Pemanfaatan Kemajuan Teknologi	Tata kelola pemerintahan

Keterkaitan isu strategis yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Keterkaitan Isu Strategis RPJMD Provinsi Banten 2012-2017 dengan Isu Strategis RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

RPJMD Provinsi Banten	RPJMD Kota Tangerang Selatan
Infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup	Sarana dan Prasarana wilayah
Ketahanan pangan	Perekonomian Daerah
Kemiskinan dan pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian Daerah • Kemiskinan dan kesejahteraan sosial • Pertumbuhan penduduk
Pendidikan dan kesehatan	Kualitas Sumber Daya Manusia
Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Tata kelola pemerintahan

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2021 juga memiliki korelasi dengan agenda prioritas (Nawa Cita) yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Keterkaitan Agenda Prioritas (NAWA CITA) RPJMN 2015-2019 dengan Isu Strategis RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021

NAWA CITA RPJMN 2015-2019	RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.	Tata kelola pemerintahan
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Tata kelola pemerintahan
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penduduk • Sarana dan Prasarana wilayah
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	Tata kelola pemerintahan
Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Sumber Daya Manusia • Pertumbuhan penduduk
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian Daerah • Sarana dan Prasarana wilayah
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian Daerah
Melakukan revolusi karakter bangsa.	Kualitas Sumber Daya Manusia
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.	Kualitas Sumber Daya Manusia

Adapun arah kebijakan umum pembangunan nasional, sebagaimana dimuat dalam RPJMN 2015-2019, adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.
- 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim.
- 5) Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh.
- 6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
- 7) Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.